

**ALOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI JL. HR. SOEBRANTAS PANAM
PEKANBARU**

Siswanto dan Syamsul Bahri

ABSTRACT

A development is an effort to gain the more and the better life. There are 4 indicators in gaining the development; they are economic change, human resources, social inhibition and the high of life needed. A development in the development country likes Indonesia; generally more consider the development of economic sector in the hope of much progressed in production of job vacancy.

There are two kinds of economic activities; they are from formal sector and informal one. Formal sector is a sector of educated people inside. However, the high of migrations in this decade create uncontrolled urbanization thus the uneducated people can be in at the formal sector. In the hope of changing their destiny, people tend to choose the informal sector as a good choice. Because of there are a need of a product and merit, this sector is still exist. The considerable study of informal sector has been done by many experts in Indonesia.

A Retailer is one of informal sector side. It is a phenomenon that we faced often in Indonesia. The existence of retailers can show a positive effect for them that need their merit. However, retailers also can create negative effect for them that consider retailers are bothering the urban development.

This research utilizes a judgment sampling technique. In this method, the sample is taken with a specific criterion which shows significant relation to the population criteria. Purposive sampling consists of some methods, but the researcher just take the proportional quota sampling, is the size of sampling taken for each categories suit to the proportion of real populations for each categories. Finally, researcher chooses 9 respondents. The analysis technique used is distribution of descriptive analysis technique. The data needed is primer data and second data got form the interview even instance.

Keywords: informal sector, retailers, migration.

ABSTRAK

Pembangunan adalah sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada 4 indikator keberhasilan pembangunan, yaitu perubahan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), kendala sosial serta tingginya kualitas lingkungan hidup. Pembangunan di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, pada umumnya mengutamakan perkembangan sektor ekonomi, dengan harapan agar kemajuan produksi di sektor ekonomi dapat menyerap lapangan kerja.

Ada 2 macam kegiatan ekonomi, yaitu sektor formal dan informal. Sektor formal adalah sektor yang hanya mampu dimasuki oleh masyarakat yang berkualifikasi dalam pendidikan. Namun, tingginya migrasi dalam beberapa dekade ini malah menciptakan arus urbanisasi yang tak terkendali sehingga mereka yang tidak berkualifikasipun memasuki perkotaan. Dengan harapan merubah nasib mereka memilih memasuki sektor informal. Kemampuan sektor informal ini bertahan dikarenakan adanya kebutuhan akan semacam produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ini. Kajian akan sektor informal telah banyak diteliti oleh berbagai para ahli di Indonesia.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal, yang mana merupakan sebuah fenomena yang sering dijumpai di kota-kota di Indonesia, keberadaan mereka dapat bersifat positif bagi masyarakat yang membutuhkan jasa mereka, namun dapat juga menjadi negatif bagi yang merasa keberadaan mereka mengganggu tata kota.

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling (Judgement Sampling). Dalam metode ini, sampel diambil dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang memiliki hubungan yang erat dengan kriteria atau ciri-ciri populasi. Purposive sampling terdiri dari beberapa metode, tapi peneliti memilih menggunakan Proportional Quota Sampling, yaitu ukuran sampel yang diambil untuk masing-masing kategori sesuai dengan proporsi populasi sesungguhnya untuk setiap kategori. Oleh karena itu, peneliti memilih sebanyak 9 orang responden. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis distribusi deskriptif. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara maupun instansi.

Kata Kunci: Sektor Informal, PKL, Migrasi

Pendahuluan

Pembangunan adalah sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada 4 indikator keberhasilan pembangunan, yaitu perubahan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), kendala sosial serta tingginya kualitas lingkungan hidup. Pembangunan di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, pada umumnya mengutamakan perkembangan sektor ekonomi, dengan harapan agar kemajuan produksi di sektor ekonomi dapat menyerap lapangan kerja, di mana untuk Indonesia dalam 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 400.000 lapangan kerja. Untuk tahun 2007 tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia 4-5% maka akan dapat menyerap 2 juta lapangan kerja, sementara angka statistik tingkat penampungan

lapangan kerja di Indonesia saat sekarang ini lebih dari 12 juta lapangan kerja (Rudi Kurniawansyah, 2005 : 26).

Sektor informal merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, pada masa kini merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di berbagai kota di dunia, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Kehadiran sektor informal memegang peranan penting dalam kehidupan perkotaan, karena dapat menunjang tersedianya lapangan kerja dan merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk di kota. (Rusli Ramli, 1992 : 12).

Sektor informal keberadaannya mampu bertahan di kota-kota tanpa bantuan pemerintah, bahkan mendapat hambatan-hambatan dari pemerintah, meski mereka justru memberi lapangan pekerjaan. Kemampuan sektor informal bertahan dikarenakan adanya kebutuhan akan semacam produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ini. Kajian akan sektor informal telah banyak diteliti oleh berbagai para ahli di Indonesia.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal, yang mana merupakan sebuah fenomena yang sering dijumpai di kota-kota di Indonesia, keberadaan mereka dapat bersifat positif bagi masyarakat yang membutuhkan jasa mereka, namun dapat juga menjadi negatif bagi yang merasa keberadaan mereka mengganggu tata kota. Terlepas dari itu, pedagang kaki lima itu sendiri adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Pekanbaru merupakan kota yang sedang beranjak menuju kota Metropolitan seiring berjalannya waktu. Dengan begitu pedagang kaki lima pun mulai menjamur di ruas tepian trotoar, seperti disalah satu jalan di Pekanbaru yaitu HR. Subrantas yang mana merupakan Kecamatan Tampan, dimana pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat (PKL) banyak dijumpai. Biasanya (PKL) ini akan memulai aktifitasnya pada waktu sore, yaitu dimulai dari jam 4 sore hingga tengah malam. Beberapa jenis “pekerjaan” yang termasuk di dalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual Koran dan majalah, penjual makanan kecil dan minuman, penjual tas, sepatu, aksesoris, gorengan dan lainnya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut :

Apa karakteristik pedagang kaki lima di Jl. HR. Subrantas Panam kota Pekanbaru ?

Faktor-faktor apa yang mendorong tumbuhnya kembangnya PKL di kota Pekanbaru?

Mengapa masalah PKL tidak mudah untuk diselesaikan oleh Pemkot Pekanbaru?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik pedagang kaki lima sebagai sektor informal yang berfungsi dalam sistem perekonomian terbatas dan mempelajari proses alokasi PKL dan faktor-faktor penyebab PKL menolak dipindahkan lokasinya oleh Pemkot Pekanbaru.

Untuk mendapatkan sampel yang akan dijadikan responden, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling (Judgement Sampling). Dalam metode ini, sampel diambil dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang memiliki hubungan yang erat dengan kriteria atau ciri-ciri populasi. Purposive sampling terdiri dari beberapa metode, tapi peneliti memilih menggunakan Proportional Quota Sampling, yaitu ukuran sampel yang diambil untuk masing-masing kategori sesuai dengan proporsi populasi sesungguhnya untuk setiap kategori. Oleh karena itu, peneliti memilih sebanyak 9 orang responden.

Tinjauan Pustaka

Definisi Sektor informal dan Kriterianya

Salah satu lapangan kerja yang mampu menampung tenaga kerja cukup banyak dengan pendidikan yang relatif rendah adalah sektor informal. Karena masyarakat dalam prinsipnya berusaha melimpahkan sebanyak mungkin resiko ekonominya kepada lembaga lain untuk menembus keamanan subsistensi dengan penghasilannya. (Scott, 1981: 53).

Menyimak sekilas pada kehidupan sosial ekonomi di perkotaan, Penciptaan kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi (modernisasi) ternyata masih jauh dari mencukupi dibanding pencari kerja tersebut rata-rata berpendidikan rendah, miskin, dan kurang terampil alternatif utama lapangan kerja yang dapat dimasuki adalah sektor informal.

Sektor informal merupakan suatu sumber berwiraswasta dengan usaha sendiri, mereka berusaha dalam sektor informal ini biasanya miskin dan oleh karena itu modal sangat diperlukan untuk memulai usaha tersebut. karakteristik paling menarik yang dimiliki oleh satuan usaha di sektor informal adalah kehadirannya dalam aktivitas ekonomi didasarkan pada peluang kesempatan kerja pada diri sendiri (Fitriyah, 1991:26). Sedangkan Hidayat (1978:26) mendefinisikan sektor informal sebagai berikut:

Sektor informal adalah sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah.

Sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak mempunyai akses) bantuan, meskipun pemerintah telah menyediakannya.

Sektor yang telah menerima bantuan, tetapi bantuan itu belum sanggup membuat sektor itu berdiri.

Ciri pokok sektor informal yang dapat didefinisikan sebagai berikut :

Aktivitas pada sektor ini tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya tidak berlangsung melalui institusi yang ada pada perekonomian modern.

Karena kebijakan pemerintah tidak sampai pada sektor ini maka sektor informal mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah.

Pada umumnya, setiap satuan usaha tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah.

Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti tempat maupun mengenai jam kerja.

Satuan usaha pada sektor ini, mudah untuk keluar dan masuk dari sektor yang satu ke sektor yang lain.

Karena modal dan peralatan serta perputaran usaha relatif kecil, maka skala operasi usaha ini menjadi kecil pula.

Teknologi yang dipergunakan termasuk teknologi yang sederhana.

Karena skala operasinya kecil dan tingkat teknologinya sangat sederhana, maka untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu. Bahkan keahliannya di dapat dari sistem pendidikan nonformal dan pengalaman.

Kebanyakan satuan usaha ini termasuk dalam one-man enterprise atau kalau mempunyai buruh, maka buruh tersebut berasal dari lingkungan keluarganya dan satuan tersebut dinamakan family enterprise.

Sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja kebanyakan berasal dari tabungan sendiri dan dari sumber keuangan tidak resmi.

Hasil produksi atau jasa dari sektor ini, terutama sekali dikonsumsi oleh golongan masyarakat miskin dan kadang-kadang golongan menengah.

Karakteristik di atas, seperti kurangnya modal, kurangnya pembeli, tempat penjualannya kurang strategis, keadaan cuaca hujan, dan sebagainya, yang membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup bagi dirinya serta keluarganya. Kuitenbrower (1993 : 31) juga mengemukakan bahwa sejumlah besar para pelaku sektor informal seringkali mengalami kemacetan kegiatan usahanya. Walaupun demikian sektor ini tetap memegang fungsi penting sebagai sumber cadangan tenaga kerja dan sistem jaminan sosial, tempat kembalinya para pekerja, manakala mereka terpaksa keluar dari sektor modern karena mereka tidak dapat diserap.

Peranan Sektor Informal

Peranan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja, terutama yang berpendidikan relatif rendah, dikarenakan: Tidak adanya hubungan kerja dalam sektor informal menjadi relatif tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mempermudah tenaga kerja dalam sektor informal menjadi relatif tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mempermudah tenaga kerja memasuki sektor ini. Jadi ia diharapkan dapat bertindak sebagai suatu kekuatan penyangga antara kesempatan kerja (*employment*) dan pengangguran. Beberapa pencari lapangan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan tetap di sektor formal, bisa bekerja di sektor informal sementara atau untuk waktu lama dari pada menganggur sama sekali (manning dan tajuddin, 1991:113).

Sektor informal termasuk pedagang kaki lima yang cara berjualannya menetap, dan pedagang kecil-kecilan, ada ketergantungan terhadap pemilik toko / modal kurang lebih secara permanen, mereka mengambil barang-barang atas kredit dan menjualnya ke daerah pedesaan (Greetz,1997:56). Bukan hanya pedagang kaki lima dan pedagang keliling saja, wiraswasta juga termasuk didalamnya. Wiraswasta dalam arti inovatif yang demikian penting, hal ini disebabkan karena dengan mengkombinasikan secara baru, sehingga terciptalah pendapatan tambahan atau peningkatan produktivitas, dan jika pendapatan yang diciptakan oleh kegiatan kewiraswastaan bertambah lebih cepat dari faktor tenaga kerja yang menuntut adil mereka, maka pendapatan rata-rata akan meningkat (Koenjoro ningrat, 1992;446).

Ciri-ciri Sektor Informal

Sektor informal sebagai masalah sosial tetap berdiri tegak seperti seolah-olah lupa atau tidak terusik bahwa dalam belasan tahun terakhir ini berbagai upaya telah dijalankan di semua lini untuk mengerti dan memahami permasalahan di sekitar sektor informal dan sekaligus menangani dan mencari jalan keluar pemecahannya. Upaya-upaya tersebut tercermin dari pembuatan konsep, teori, metode, pelaksanaan tugas atau proyek-proyek, kesempatan politik dalam bentuk kerjasama internasional.

Adapun ciri-ciri baku dari sektor informal adalah sebagai berikut (Sethuraman 1984:23) :

Seluruh aktivitasnya bersumber pada sumberdaya sekitarnya.

Ukuran usaha umumnya kecil dan aktivitasnya merupakan usaha keluarga.

Untuk menopang aktivitasnya digunakan teknologi yang tepat guna dan memiliki sifat yang padat karya.

Tenaga kerja yang bekerja dalam aktivitas sektor ini telah terdidik atau terlatih dalam pola-pola yang tidak resmi.

Seluruh aktivitas dalam sektor ini berada diluar jalur yang diatur pemerintah

Aktivitas mereka bergerak dalam pasar sangat penting.

Kendala Pedagang Kaki lima

Jenis pekerjaan sektor informal adalah pedagang kakilima. Menurut Zainuddin yang dikutip dalam majalah galang No. 1 Tahun 1993 pedagang kakilima adalah orang-orang yang berjualan ditrotoar, namun sekarang terdapat kecenderungan baru untuk tidak terfokus pada trotoar dalam melakukan operasinya, tetapi disetiap tempat yang menjadi ajang lalu lintas manusia (Zainuddin, 1995:50).

Pedagang kakilima mempunyai persoalan tidak berbeda jauh dengan jenis persoalan yang dihadapi oleh pengusaha sektor informal lainnya. Seajauh pengamatan yang dibuat oleh majalah Buletin Ekonomi Bapindo bulan Juni-Agustus 1996, kendala yang dihadapi pedagang kakilima adalah :

Permodalan. Secara umum pedagang kakilima sangat terbatas sehingga omsetnya terbatas dan akhirnya keuntungannya juga minim;

Kelembagaan. Kesadaran tentang pentingnya berorganisasi belum dipahami benar oleh para pedagang kakilima, mereka dominan berusaha sendiri, padahal berorganisasi penting dalam pengembangan usaha;

Motivasi. Pada umumnya pedagang kakilima hanya sekedar sembilan atau batu loncatan untuk sementara menunggu kesempatan alih profesi, sehingga mereka kurang memiliki etos kerja;

Pemasaran. Aspek pemasaran terkait dengan lokasi usaha, yaitu kawasan yang ramai yang banyak didatangi masyarakat, Kehadiran pedagang kakilima disuatu lokasi kadang tidak diinginkan oleh pemda setempat, karena dianggap merusak keindahan dan mengganggu ketertiban sehingga sering terjadi pengusuran.

Pendekatan Push And Pull Factors

Sedangkan Mochtar Naim mengatakan bahwa penduduk desa melakukan perpindahan karena terjadi ketidakseimbangan ekonomi antar berbagai wilayah yang ada di Indonesia (Naim, 1982: 247). Melalui tulisan tersebut digambarkan adanya faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan.

Faktor-faktor pendorong (push factors), biasanya digambarkan sebagai akibat kekurangan sumber-sumber untuk kebutuhan hidup, adanya kemiskinan dan pola hubungan sosial yang mengekang.

Faktor-faktor penarik (pull factors), digambarkan sebagai keadaan yang berlawanan dengan keadaan yang menjadi faktor pendorong di tempat asal, misalnya kesempatan kerja yang lebih baik di tempat tujuan. Jadi perpindahan yang terjadi dikarenakan adanya suatu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik daripada di daerah asal. Pada dasarnya bahwa dorongan utama orang untuk melakukan mobilitas adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Apabila di suatu tempat atau daerah kebutuhan seseorang belum dapat dipenuhi maka ia akan mencari informasi mengenai tempat lain yang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan keluarganya.

Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton

Fungsionalisme struktural adalah salah satu aliran atau perspektif didalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Teori struktural fungsional memandang masyarakat yang terdiri dari berbagai

elemen atau institusi. Masyarakat luas akan berjalan normal kalo masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Secara ekstrim teori fungsionalisme struktural mengatakan bahwa segala sesuatu dalam masyarakat ada fungsinya, termasuk hal-hal seperti kemiskinan, peperangan, atau kematian. (Bernard,2007).

Lebih lanjut Robert K. Merton menjelaskan bahwa teori Fungsionalisme Struktural memiliki beberapa pokok pikiran yang berhubungan dengan disfungsi, fungsi yang tampak (manifest Function) dan fungsi yang tampak (latent function). Dijelaskan bahwa disfungsi meliputi sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi, dan akibat-akibat ini bisa saja berbeda menurut kepentingan orang-orang yang terlibat. Lebih lanjut Merton menjelaskan bahwa fungsi yang tampak dan tak tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat yang orang harapkan dari satu tindakan sosial atau situasi sosial. Sedangkan fungsi tak tampak adalah konsekuensi atau akibat yang tidak diharapkan ataupun tidak dimaksudkan. (Bernard,2007).

Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori konflik Ralf Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori Konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Dahrendorf, sistem sosial terbentuk bukan oleh kerjasama sukarela atau pun oleh konsensus, tetapi oleh “ketidakbebasan dan dipaksakan” yang bersumber dari adanya distribusi otoritas (Ritzer & Goodman, 2004: 154).). Ia berusaha untuk mendasarkan teorinya pada perspektif Marxis modern yang menerima meluasnya konflik sosial yang didasarkan pada oposisi kepentingan kelas dan konsekuensi konflik itu dalam melahirkan perubahan sosial. Tetapi, tidak seperti aliran kritis Frankfurt, Dahrendorf tidak menggunakan perspektif Marxis sebagai suatu dasar untuk kritik budaya yang radikal, tetapi untuk analisa struktur sosial. Marx mendasarkan teori pembentukan dan konflik kelasnya pada pemilikan alat produksi, sedangkan bagi Dahrendorf, faktor yang lebih penting adalah kontrol atas alat produksi, bukan pemilikannya.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di Pekanbaru, tepatnya di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Lokasi ini diambil dengan beberapa pertimbangan, diantaranya :

Merupakan salah satu pintu masuk ke Pekanbaru

Merupakan daerah yang berkembang pesat.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, gejala, nilai, benda-benda atau peristiwa (Winarno Surahman, 1985: 29). Yang menjadi populasi atau objek dari penelitian ini adalah para pedagang kaki lima yang berjualan rokok, majalah, koran, atau makanan dan minuman yang berada di satu tempat. Dikarenakan begitu banyaknya pedagang kaki lima di Kelurahan Baru Kecamatan Tampan maka penulis memutuskan untuk mengambil sebanyak 9 orang responden, yang menggunakan teknik Purposed Sampling yaitu dalam metode ini, sampel diambil dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang memiliki hubungan yang erat dengan kriteria atau ciri-ciri populasi. Purposive sampling terdiri dari beberapa metode, tapi peneliti memilih menggunakan Proportional Quota Sampling, yaitu ukuran sampel yang diambil untuk masing-masing kategori sesuai dengan proporsi populasi sesungguhnya untuk setiap kategori.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam

Dimana penulis mengadakan wawancara mendalam (Dhept Interview) dengan responden untuk mendapatkan data dan informasi seperti: identitas pedagang, upaya pengembangan usaha, hubungan pedagang terhadap pelanggan dan terhadap pedagang bahan baku, serta aktivitas harian pedagang.

Observasi

Secara metodologis bagi pengguna observasi adalah untuk mengotimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Selain itu, observasi juga memungkinkan pengamat untuk merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek, sehingga memungkinkan pula peneliti sebagai sumber data.

Observasi disini meliputi karakteristik pedagang kaki lima, faktor-faktor apa saja yang mendorong tumbuh kembangnya PKL di kota Pekanbaru, dan mengapa PKL tidak mudah untuk diselesaikan. Selain itu, aktivitas pedagang sehari-hari, dalam bentuk pengamatan langsung dan foto, sehingga peneliti dapat mengamati perilaku, tindakan dan aktifitas pedagang dalam kegiatan ekonominya.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer meliputi : tingkat pendapatan dan pengeluaran, persepsi pedagang dengan pelanggan, hubungan pedagang dengan pedagang bahan baku, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usaha, dll.

Data Sekunder

Data yang telah tersedia sebelumnya yang mendukung penelitian ini serta sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder meliputi: jumlah pedagang dan hasil kajian-kajian tentang pedagang kaki lima.

Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka, kemudian disusun. Data yang telah disusun kedalam tabel nantinya akan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan tabel tunggal maupun tabel silang. Selanjutnya dikemukakan bukti-bukti empiris berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan sehingga hubungan antara variabel seperti yang terdapat dalam konsep operasional dapat diterima.

Faktor-Faktor Yang Mendorong Tumbuh Kembangnya Pkl Di Kota Pekanbaru

Faktor Pendorong

Kota-kota di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini, tidak hanya dikota-kota besar namun telah merambah pada kota-kota lainnya. Banyak yang beranggapan bahwa hal ini disebabkan oleh globalisasi yang telah merubah dunia menjadi tidak terbatas. Tentu saja hal ini memberikan dampak positif dan negatif, baik dari segi pendidikan, pelayanan, kesehatan, dunia politik dan kependudukan. Migrasi adalah salah satu dampak yang dipengaruhi secara signifikan.

Perkembangan kota-kota yang tidak seimbang membuat banyak penduduk berbondong-bondong untuk melakukan perpindahan demi perubahan nasib. Tumpukan penduduk pada titik kota-kota besar akan memberikan ketidakseimbangan dalam kualitas pendidikan, pelayanan dan lainnya bagi daerah lain, karena perhatian hanya terfokus pada titik tumpukan itu. Kemudian inilah yang menjadi permulaan terjadinya PKL. Mereka yang tidak puas dengan pendapatan atau pekerjaan mereka di daerah asal memutuskan untuk pindah ke kota demi perubahan hidup.

Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tingginya arus globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Pendidikan dimasa lalu yang dianggap hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu sekarang telah berpindah menjadi sesuatu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh individu.

Idealnya pendidikan pada zaman sekarang dimulai pada masa kanak-kanak yaitu memasuki TK (taman Kanak), kemudian dilanjutkan dengan SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan kemudian melanjutkan ke PT. tapi yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa tidak semua orang mampu memenuhi kriteria tersebut. Berbagai persoalan hidup menjadi alasan seseorang untuk memutuskan tidak melanjutkan pendidikan.

Tingginya klasifikasi yang diberikan oleh perusahaan dalam mencari karyawan akan berdampak terhadap tingkatan pendidikan seseorang. Seorang yang tamatan Srata Satu (S1) akan mendapatkan pekerjaan yang berbeda dari mereka yang hanya tamatan SMP atau SMA. Selain itu, tingginya pengangguran terpelajar pun pada saat ini kian menambah masalah pemilihan pekerjaan. Kaum-kaum terpelajar ini juga mengalami penyaringan untuk memasuki sebuah perusahaan atau instansi, kemudian bagaimana dengan mereka yang hanya tamatan SMA, SMP bahkan SD? Jalan bagi mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan berwirausaha menjadi PKL. Untuk menjalankan profesi ini tidak perlu memenuhi kualifikasi yang sulit, ijazah yang tinggi. Tapi hanya membutuhkan kemauan dan kerja keras.

Ekonomi

Faktor ekonomi adalah alasan yang banyak dialami banyak orang. Tingginya kebutuhan namun tidak sesuai dengan pendapatan, menjadi salah satu alasan mereka untuk memasuki pekerjaan sebagai PKL. Selain itu, waktu untuk melakoni pekerjaan ini pun tidak menuntut banyak waktu. Jadi, mereka pada waktu pagi hingga siangnya bisa bersama keluarga, ataupun menjalankan pekerjaan lainnya.

Pedagang kaki lima adalah masalah yang bisa dibilang tidak mudah mudah bagi pemerintah untuk menanganinya. Tapi walaupun begitu pemerintah tetap berusaha untuk melakukan sosialisasi dan usaha lainnya untuk mencari tempat yang baik bagi mereka. Dalam hal ini pemerintah menyadari bahwa sektor informal adalah sektor yang sulit dihapus, karena sektor ini menampung masyarakat yang tidak bisa memasuki sektor formal.

Kelemahan Daerah Asal

Kelemahan daerah asal adalah salah satu alasan mendasari perpindahan penduduk yang tak terkendali. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebanyakan dari mereka yang merantau ke pekanbaru adalah penduduk yang berasal dari Sumbar. Daerah yang berbukit-bukit menjadikan daerah ini subur ditumbuhi tanaman sayuran dan buah-buahan. Tapi, sayangnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan ini. Selain itu, bagi orang Sumbar atau Minang Kabau mereka merantau itu adalah kewajiban.

Faktor-faktor Penarik

Faktor penarik adalah faktor yang menarik penduduk untuk melakukan migrasi. Biasanya faktor penarik ini adalah iming-iming yang ditawarkan oleh kota-kota pada umumnya. Yaitu seperti harapan kehidupan yang lebih baik dan sarana fasilitas yang lengkap. Tanpa memperdulikan masalah yang akan dihadapi di kota nantinya, mereka tetap melakukan mobilitas demi perubahan nasib kedepannya.

Mobilitas Perpindahan Penduduk (Harapan Merantau)

Pekanbaru merupakan kota yang berkembang dengan kecepatan yang signifikan. Didiami bermacam-macam suku yang mana berasal dari daerah sepanjang Sumatra dan menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan untuk bermigrasi, hal ini dikarenakan Pekanbaru memiliki akses yang baik, dari segi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya.

Ketidakpuasan akan pekerjaan yang dimiliki di daerah asal membuat banyak orang berinisiatif untuk berpindah tempat tinggal. Harapan akan pekerjaan yang layak, gaji yang memadai membuat banyak penduduk melakukan mobilitas tanpa berikir lebih panjang konsekuensi yang akan mereka terima di kota. Kota Pekanbaru sendiri menawarkan banyak banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mulai dari sektor formal dan informal.

Mobilitas penduduk sendiri, adalah semua gerakan penduduk yang melewati batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu pula (Mantra, 1978). Bentuk-bentuk mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi tiga, yakni nglaju (commuting), sirkulasi (circulation) dan menetap (migration). Nglaju yaitu bentuk mobilitas penduduk dari desa ke kota atau ke tempat lain dan kembali ke tempat asal pada hari yang sama. Sirkulasi yaitu bentuk mobilitas penduduk dari desa ke kota atau ke daerah lain dalam jangka waktu lebih dari satu hari, tetapi tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan. Migrasi yaitu bentuk perpindahan penduduk ke kota atau ke daerah lain dengan maksud untuk bertempat tinggal menetap di daerah tersebut.

Kemudahan Akses Pelayanan

Kemudahan dalam akses baik pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat ditemukan di kota. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan desa. Kemudahan-kemudahan ini juga menjadi

pertimbangan penduduk untuk melakukan migrasi. Keinginan agar anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan menjadikan banyak orang tidak berpikir panjang untuk melakukan migrasi. Padahal banyak diantara mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap di kota yang mereka akan tinggali.

Ketiadaan pekerjaan yang menunggu, menjadikan pekerjaan sebagai PKL menjadi solusi. Menurut mereka Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang memiliki tingkat konsumtif yang tinggi, jadi usaha pedagang adalah pekerjaan yang menjanjikan.

Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Tidak Menaati Kebijakan Pemerintah

Fungsi PKL Bagi Pemerintah

Fenomena urbanisasi di dunia ketiga yang cukup menarik adalah aktivitas sektor informal di perkotaan. Sektor informal telah menjadi aktivitas ekonomi alternatif bagi penduduk kota setelah faktor formal dan telah membuktikan kemampuannya untuk dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun.

Meski berbagai kecaman terhadap PKL disuarakan namun ternyata bagi pemerintah PKL justru memiliki fungsi. Ada 2 Fungsi PKL bagi pemerintah yaitu:

Penyerapan Tenaga Kerja

Kota Pekanbaru merupakan kota yang sedang berkembang dan merupakan tujuan urbanisasi yang potensial. Maka dari itu tingginya urbanisasi tiap tahunnya semakin menyempitkan lapangan pekerjaan di sektor formal. Bagi mereka yang memiliki kemampuan memasuki sektor formal hal ini memberikan tantangan tersendiri karena begitu banyaknya lapangan pekerjaan. Namun bagi mereka yang tak mampu memasuki sektor formal dikarenakan ketidakmampuan memenuhi persyaratannya maka sektor informal ini menjadi pilihan. Walau memberikan dampak yang merugikan dari segi keindahan kota namun pedagang kaki lima memberikan solusi bagi mereka yang tetap ingin bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya.

Pendapatan Bagi Pemerintah Dari Sektor Pajak (Retribusi)

Sektor informal ini juga memberikan kontribusi yang lumayan besar dari sektor pendapatan daerah yaitu pemungutan retribusi. Dalam hal ini, retribusi yang dimaksud adalah pembayaran biaya kebersihan bulanan sebesar Rp.10.000.

Fungsi PKL Bagi Masyarakat

Adapun begitu bagi masyarakat ternyata PKL juga mempunyai fungsi. Adapun fungsi PKL bagi masyarakat yaitu:

Mempermudah Masyarakat Memenuhi Kebutuhan

Pedagang kaki lima yang selama ini kerap dicap mengganggu keindahan tata kota ternyata dalam pandangan masyarakat memiliki fungsi tersendiri. Banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka malahan menyukai keberadaan pedagang kaki lima karena misalkan mereka menginginkan makanan kecil atau cemilan mereka bisa menemukan disepanjang jalan trotoar pedagang yang menjajajakannya.

Alasan Mengapa PKL Sulit Di Relokasikan

Dalam pemilihan lokasi pasar atau tempat berdagang perlu diperhatikan banyak hal. Baik dari segi ruang dan waktu, dalam pemilihan tempat sering kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pengaturan tata ruang. Kadang kala menurut pedagang merupakan tempat yang strategis untuk berdagang, namun menurut pemerintah tempat tersebut tidak bisa untuk berdagang. Banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktivitasnya ditempat-tempat yang seharusnya menjadi public space. Public space merupakan tempat umum dimana masyarakat bisa bersantai, berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota. Tempat umum tersebut bisa berupa taman, trotoar, halte bus, dan halaman pertokoan yang dapat digunakan untuk parkir kendaraan pengunjung toko.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang kaki lima untuk tidak mematuhi kebijakan pemerintah:

Faktor Internal

Faktor ini berasal dari diri para pedagang kaki lima itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara dengan para pedagang kaki lima yang menjadi responden, penulis mengelompokkan menjadi tiga kelompok perilaku antara lain:

Pengetahuan Tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Banyak pedagang kaki lima yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah kota pekanbaru yang melarang melakukan di daerah terlarang. Hal ini dikarenakan para pedagang menggelar dagangan berdasarkan situasi atau waktu dimana melakukannya telah ada yang menggelar dagangan sebelumnya. Pedagang kaki lima ini hanya tahu dilarang jualan di daerah tersebut tetapi pedagang kaki lima tidak mengetahui peraturannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengetahuan pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah kota pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pengetahuan Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Tahun 2012

No.	Uraian	Jumlah	Persentase(%)
1.	Mengetahui	3	15
2.	Kurang Mengetahui	11	30
3.	Tidak Mengetahui	6	55
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan 2012

Tabel di atas menjelaskan bahwa responden tidak mengetahui tentang Peraturan daerah Kota Pekanbaru yang terkait dengan pedagang kaki lima. Walaupun para responden memiliki pendidikan rata-rata SLTP dan SLTA namun menyangkut pengetahuan terhadap Peraturan daerah Kota Pekanbaru masih rendah. Pedagang hanya tahu bahwa mereka dilarang berjualan di daerah tersebut. Larangan itu mereka ketahui melalui penertiban yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Kepedulian Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Walaupun ada yang mengetahui namun mereka tidak peduli terhadap peraturan daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena mereka tidak mempunyai alternatif tempat menggelar jualan ditempat lain. Sebenarnya menurut responden pernah melakukan mencari tempat berjualan di tempat lain namun kebreuntungan tidak diperolehnya. Karena lokasi tersebut kurang strategis dan pengunjungnya tidak sebanyak di tempat mereka yang biasa..Jadi mereka kembali ke tempat semula.

Perilaku Legalisasi

Dalam menggelar dagangan para pedagang kaki lima telah dipungut retribusi. Retribusi ini berupa keamanan dan kebersihan. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima ini telah ada yang melegalisasikan tempat dagangannya. Karena telah membayar retribusi kepada oknum pemungut retribusi maka merasa mereka telah disetujui untuk melakukan jual beli.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga mempengaruhi perilaku pedagang kaki lima dalam menggelar dagangan di daerah terlarang. Ada beberapa alasan lain yang disampaikan para pedagang kaki lima dalam menggelar dagangan di daerah terlarang. Daerah terlarang menurut para pedagang merupakan daerah yang sangat potensial bagi para pedagang. Hal ini terlihat dari beberapa pendapat para pedagang kaki lima mengapa menggelar dagangannya. Pendapat tersebut antara lain :

Lokasi

Lokasi merupakan salah satu factor eksternal dari seorang pedagang. Dimana tempat berjualan sangat menentukan keberhasilan dalam suatu bisnis. Bila lokasi tidak strategis maka akan selalu merugi dalam suatu bisnis walau sekecil apapun. Lokasi usaha sangat menentukan kesuksesan usaha anda. Pilih lokasi usaha yang merupakan tempat lalu lalang/penduduk bukan sekedar lalu lalang mobil.

Lokasi harus dilalui dan terlihat secara langsung oleh orang yang lewat dengan target utama misalnya, anak remaja sampai anak kuliah. Semakin banyak dilalui orang semakin bagus. Pemilihan lokasi yang menjadi dasar mengapa para pedagang kaki lima memilih fasilitas umum seperti trotoar menjadi arena berjualan, bahkan merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam menentukan lokasi berjualan para pedagang mempunyai tips atau cara tersendiri

Waktu

Waktu merupakan hal yang sangat menentukan untuk mendapatkan keuntungan. Karena ada waktu-waktu tertentu yang dapat menentukan keberhasilan dalam berdagang. Waktu yang paling ramai orang berkunjung adalah waktu malam hari. Waktu ini yang paling banyak diincar oleh para pedangan kaki lima. Karena waktu ini para pedagang kaki lima bertahan melakukan usaha di areal yang di larang oleh pemerintah.

Biaya

Biaya juga menentukan kesukseksan dalam perdagangan. Biaya yang besar yang dikeluarkan oleh para pedagang kaki lima adalah biaya sewa tempat, retribusi kebersihan dan retribusi

keamanan. Retribusi ini merupakan salah satu indikasi adanya legalisasi terhadap usaha yang dijalankan. Bila para pedagang kaki lima ini telah membayar retribusi kepada salah satu petugas pemungut retribusi berarti telah diijinkan untuk melakukan usaha. Hal ini yang membuat para pedagang kaki lima merasa tidak melanggar peraturan yang telah ada.

Pendapatan

Pendapatan juga dapat menentukan keeksisan dalam berdagang. Semakin tinggi pendapatan para pedagang kaki lima maka semakin bertahanlah usaha mereka. Karena apabila pedagang kaki lima pendapatannya berkurang maka akan cepat gulung tikar. Dengan pendapatan yang cukup tinggi membuat para pedagang kaki lima untuk tetap bertahan berjualan di tempat yang di larang oleh pemerintah. Hal ini juga yang merupakan alasan para pedagang tetap melakukan usaha di areal halaman toko atau trotoar.

Penutup

Kesimpulan

PKL adalah Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal, yang mana merupakan sebuah fenomena yang sering dijumpai di kota-kota di Indonesia, keberadaan mereka dapat bersifat positif bagi masyarakat yang membutuhkan jasa mereka, namun dapat juga menjadi negatif bagi yang merasa keberadaan mereka mengganggu tata kota. PKL menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Ada 3 faktor yang mendorong tumbuh kembangnya PKL di kota Pekanbaru, yaitu masalah mobilitas penduduk, pendidikan dan ekonomi. Sulitnya mencari pendapatan yang layak di daerah asal menjadi salah satu dorongan penduduk untuk melakukan migrasi. Ditambah tingkat pendidikan dan skill yang kurang memadai, kemudian masalah ekonomi yang tak terelakkan menjadi alasan mereka untuk memasuki sektor informal (PKL).

Masalah PKL sudah diusahakan pemerintah untuk melakukan relokasi. Dalam hal ini pemerintah sudah memberikan perhatian. Kemudian alasan kenapa PKL sulit direlokasikan dikarenakan adanya 2 faktor. Yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal itu sendiri yaitu, kurang pengetahuan akan peraturan daerah dan kurangnya kepedulian terhadap peraturan. Sedangkan faktor-faktor eksternal yaitu lokasi, waktu, biaya dan pendapatn.

Saran

Diharapkan pemerintah tidak hanya memperhatikan masalah PKL ini untuk beberapa waktu saja. Dikhawatirkan apabila pemerintah jika hanya setengah-setengah melakukan penertipan relokasi, bisa jadi mereka yang tidak puas akan kemabali lagi ke lokasi sebelumnya. Tingkat solidaritas PKL ini cukup tinggi, apabila ada beberapa yang kembali, maka yang lainpun akan terhasuti untuk kembali pula ketempat sebelumnya mereka berjualan.

Pemerataan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan yang cukup tinggi, menjadikan tidak semua penduduk bisa memasuki dunia pendidikan. Diharapkan pemerintah memiliki solusi yang lebih matang untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia yang masih kurang.

Pemerataan tingkat perkembangan pembangunan daerah akan meminimalisir migrasi penduduk. Diharapkan pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan tingkat pembangunan daerah.